

## Kementerian Kesehatan Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Gorontalo

- Jalan Trans Sulawesi, Tolotio, Tibawa Kabupaten Gorontalo 96231
  (0453) 8692777, 0821-9434-6722
- https://www.kkpgorontalo.com

NOMOR SOP : OT.02.02/1/821-B/2024

TGL. PEMBUATAN : 08 April 2018

TGL. REVISI : 10 Februari 2025

TGL. EFEKTIF : 08 Mei 2018

DISAHKAN OLEH

NAMA SOP:

Kepata Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Gorontalo

Suprapto SKM., M.Kes (Epid) WIP. 197005181993031001

PERMOHONAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

TERIAN KESET MIP. 19700518199303100

Kemenkes

# **SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM**

#### DASAR HUKUM:

- 1. Undang undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik
- 2. Undang undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
- 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Arsip
- 5. Pemenpan Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah
- Permenkes RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Daftar Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI
- 7. Kepmenkes RI Nomor: HK/01.07/MENKES/346/2017 Tentang PPID di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI

## KUALIFIKASI PELAKSANA :

- 1. Memahami peraturan perundang undangan yang terkait
- 2. Pengetahuan umum permintaan informasi publik
- 3. Menerapkan Core Values Aparatur Sipil Negara "BerAKHLAK"
- 4. Menerapkan Budaya Kerja "HULONDALO" BKK Kelas I Gorontalo

#### KETERKAITAN

- 1. SOP Penatalaksanaan Surat Masuk
- SOP Penatalaksanaan Surat Keluar
- 3. SOP Penatalaksanaan Surat Arsip

#### PERALATAN / PERLENGKAPAN :

- 1. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan yang terkait
- 2. Komputer dan Alat Tulis Kantor
- 3. Seperangkat Komputer yang dilengkapi program pengolah data
- 4. Buku Agenda Surat

#### PERINGATAN:

Apabila SOP Permintaan Informasi Publik tidak disusun, maka kegiatan pelayanan publik akan terganggu dan berpotensi menimbulkan masalah bila pelayanan menjadi terhambat

# PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Permintaan informasi publik, wajib dipublikasikan kecuali yang bersifat dikecualikan menurut undang-undang

Prosedur Permohonan Permintaan Informasi Publik								
No.	Aktifitas	Pelaksana			Baku Mutu			
		Ketua PPID	TIM PPID	Petugas Admin	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Menerima surat permohonan permintaan informasi publik dan meneruskan kepada tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)				Forum Permohonan Informasi publik	5 Menit	Form Permohonan yang telah diagenda	
2	Menyiapkan dan membuat konsep informasi yang akan diberikan kepada pemohon dan menyampaikan kepada ketua PPID untuk diberikan persetujuan	Т	<b>&gt;</b>		Surat permohonan data dan informasi	60 Menit	Konsep informasi	
3	Memeriksa konsep informasi yang akan diberikan kepada pemohon apakah termasuk kategori informasi yang dikecualikan atau tidak	Y			Konsep informasi dan disposisi	30 Menit	Data informasi yang disetujui	
	Memberikan tanda bukti penyerahan informasi publik kepada pemohon serta membukukan dan mencatat.		_		Tanda Terima informasi publik	1 - 10 hari (dapat diperpanjang paling lambat 7 hari)	tanda terima penerimaan berkas gratifikasi	